

**KEANDALAN VALIDITY VERIFICATION SYSTEM BUKTI
TRANSAKSI: MAMPUKAH MENCEGAH FRAUD ACCOUNTING?**

Rafles Ginting¹, Ibnu Aswat², Helma Malini³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura
rafles.ginting@ekonomi.untan.ac.id

ABSTRACT

Fraud is defined as an intentional act of deception done by one or more people. This fraud can occur in management, either directly or through a third party. Many things can be done by the company in the deployment of accounting fraud prevention. One of them is confirming the validity of transaction evidence, which is critical since transaction evidence is basic transaction papers, both self-made and from third parties, that are used as sources for a company's recording or preparation of financial statements. Proof of transactions is critical in averting the creation of future financial issues. Fraud detection uses machine learning, statistical analysis, and behavioral tracking to uncover the patterns and strategies criminals use to commit fraud. When fraud is detected, the system can prevent fraud before it causes damage to your business or organization. It can be used to prove that an entity or organization has a good anti-fraud system in place.

Keywords: fraud accounting, transaction evidence, verifying the validity, prevention

ABSTRAK

Fraud didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang disengaja yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Kecurangan ini dapat terjadi pada manajemen, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan pencegahan kecurangan akuntansi. Salah satunya adalah memastikan keabsahan bukti transaksi, yang sangat penting karena bukti transaksi merupakan dokumen dasar transaksi, baik yang dibuat sendiri maupun dari pihak ketiga, yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan perusahaan. Bukti transaksi sangat penting dalam mencegah terciptanya masalah keuangan di masa depan. Deteksi penipuan menggunakan pembelajaran mesin, analisis statistik, dan pelacakan perilaku untuk mengungkap pola dan strategi yang digunakan penjahat untuk melakukan penipuan. Ketika penipuan terdeteksi, sistem dapat mencegah penipuan sebelum menyebabkan kerusakan pada bisnis atau organisasi Anda. Ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa suatu entitas atau organisasi memiliki sistem anti-penipuan yang baik.

Kata Kunci: *Fraud* akuntansi, bukti transaksi, verifikasi validitas, pencegahan

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif
Volume 6/Nomor 1/Juli 2023
doi:10.11594/untad.jan.6.1.19462
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



A. PENDAHULUAN

Kecurangan atau *Fraud* dikatakan sebagai suatu tindakan kecurangan atau penyimpangan yang dilaksanakan secara disengaja oleh seseorang ataupun lebih. Dimana kecurangan tersebut dapat terlaksana di sebuah *management public* yang dilakukan dengan cara langsung maupun melalui pihak ketiga. (Surjandari & Martaningtyas, 2015) Hal ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak lain yang bertanggung jawab menjalankan bisnis. Tindakan kecurangan ini atau *fraud* ini dapat terjadi dalam sebuah manajemen yg dilakukan secara eksklusif atau melalui perantara atau pihak ketiga. Tindakan kecurangan tentunya dapat melanggar hukum yang berlaku hal ini dikarenakan karena terdapat berbagai unsur kecurangan yang terjadi. Karena itu, jelas sudah bahwa tindakan kecurangan merupakan salah satu bentuk dari tindakan melanggar hukum.

Pengertian kecurangan di dalam akuntansi atau *fraud* akuntansi juga dapat berupa suatu bentuk perbuatan yang terkait dengan suatu tindakan penipuan kriminal yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun manfaat dalam bentuk uang pada pihak lain yang melakukan tindak pidana penipuan dan kecurangan. (ACFE, 2008) Dalam suatu kecurangan atau *fraud*, pasti terjadi suatu bentuk kesalahan yang menyebabkan kerugian, terutama pada hal finansial perusahaan. tindakan ini akan lebih mudah dilaksanakan apabila jika pihak yang melakukan ialah oknum yang bersumber dari suatu organisasi. Hal ini bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan personal ataupun keuntungan kelompok nya dan dapat merugikan berbagai pihak.

Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan *fraud* bukanlah menjadi hal yang tabu, tindakan *fraud* bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. *Fraud* bukan hanya terjadi pada perusahaan saja, namun sudah menjalar baik lembaga pemerintahan maupun organisasi nirlaba. Nartono (2020) Mengatakan bahwa *Fraud Accounting* yang paling sering terjadi adalah dalam bentuk manipulasi nota. Bentuk *fraud accounting* berupa manipulasi nota mungkin bukanlah hal yang tabu, karena memang tindakan tersebut sudah sering kita temui dalam berbagai kasus *fraud accounting* baik pada perusahaan, Lembaga pemerintahan maupun organisasi nirlaba. Dengan adanya Tindakan *fraud* berupa manipulasi nota dapat merugikan berbagai pihak akibatnya dilakukannya Tindakan *fraud* oleh segerombolan oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi dalam sebuah organisasi baik perusahaan atau Lembaga pemerintahan, seperti diketahui juga bahwa pelaku dalam tindakan ini akan terus bereaksi dan melakukan aksinya jika tidak ada pengendalian dalam penghindaran *fraud accounting*, Oleh sebab itu berdasarkan fenomena tersebut penting adanya sebuah upaya dalam memaksimalan pencegahan *fraud*.

Di dalam pelaksanaan pencegahan *fraud Accounting* banyak hal yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Salah satunya adalah melakukan verifikasi keabsahan bukti transaksi, hal ini menjadi sangat penting karena bukti transaksi dari berbagai berkas dasar dari transaksi, baik yang di buat sendiri ataupun dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan, dapat di gunakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dari perusahaan (Usman, 2020). Dalam hal ini Bukti transaksi memiliki peran penting didalam melakukan pencegah atas munculnya masalah keuangan di waktu mendatang.

Adanya catatan suatu transaksi berupa bukti transaksi atau bukti lainnya bukan berarti tidak ada gunanya. Ada beberapa tujuan pencatatan transaksi. Termasuk di dalamnya adalah memberikan informasi yang lebih rinci dan terperinci tentang berbagai perubahan sumber daya keuangan perusahaan atau badan hukum yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan bisnis yang biasa disebut sebagai transaksi, dan menyajikan informasi terkait. Berdagang dengan berbagai sumber pendanaan, modal ekuitas, dan hutang yang dibayar oleh perusahaan. Kami kemudian memberikan informasi

keuangan untuk membantu menilai potensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan dan menyajikan informasi yang relevan untuk pelaporan keuangan. Pentingnya perusahaan bagi pemakai laporan keuangan dan terhindarnya kesalahan dalam pelaksanaan pencatatan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, semua bukti transaksi yang ada harus disimpan rapi.

Bukti transaksi dikatakan akurat jika bukti transaksi yang diterbitkan sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan, yang menjadi permasalahan terkait dengan pemalsuan bukti transaksi yang masih sering terjadi. Penciptaan sebuah system verifikasi keabsahan bukti transaksi dipandang mampu untuk mencegah *fraud accounting* yang marak terjadi selama ini dan semakin merajalela. Keandalan dari sistem verifikasi keabsahan bukti transaksi ini nanti akan dilakukan pengujian kelayakan dari system tersebut dan terdapat tim control dari system verifikasi tersebut yang berguna dalam pemaksimalan pencegahan *fraud accounting*, terkhusus yang berasal dari pemanipulasian nota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memiliki sifat komprehensif, intens, memerinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah berbagai masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), kecurangan dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melawan hukum yang pelaksanaannya dengan sengaja untuk tujuan tertentu salah satunya adalah memanipulasi atau memberikan suatu laporan yang keliru terhadap pihak lain yang dilakukan oleh pihak internal ataupun dari eksternal organisasi untuk mendapatkan suatu keuntungan pribadi maupun kelompok baik itu secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan pihak lain. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membedakan kecurangan (*fraud*) ke dalam 3 bentuk berdasarkan perbuatannya, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dan korupsi (*corruption*). Dari segi Verifikasi Data Menurut IEEE-STD-610 diartikan sebagai pengujian yang menitik beratkan pada sistem guna membuktikan bahwa adanya teknik pengumpulan data yang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan pada tahap perkembangan tertentu sehingga mengurangi eror pada saat input data dalam berbagai jenis metode penelitian yang dilakukan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian verifikasi adalah suatu pemeriksaan terkait kebenaran dari laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Sementara itu, arti verifikasi data adalah pemeriksaan kebenaran data (Cambridge Dictionary, 2022). Sistem anti-penipuan, di sisi lain, terdiri dari serangkaian tindakan atau proses yang mencegah transaksi penipuan. Solusi anti-penipuan menganalisis setiap transaksi, menandainya sesuai dengan legitimasinya, dan menganalisisnya. Kebijakan anti-penipuan tradisional terdiri dari sistem deteksi penipuan, sistem pencegahan penipuan, dan sistem analisis penipuan.

Secara umum Pengertian verifikasi yang dituliskan menurut wikipedia adalah teori filsafat positif logis didalam memilih metode pengalaman. Dalam artian, bahwa suatu sumber yang didasarkan pengetahuan serta pengamatan dengan melalui analisis logis dengan bantuan berupa simbol-simbol logika dengan menggunakan metode dalam pemecahan masalah dengan melalui metode empirik. Hal tersebut berarti bahwa jika terdapat sesuatu yang tidak dapat diverifikasi dengan secara empirik maka hal tersebut membuktikan suatu hasil sia-sia. Teori tersebut, bagi penganutnya memiliki suatu masalah konsekuensi untuk filosofi tradisional, sebab, jika benar, akan menyebabkan banyak pekerjaan sia-sia pada filosofis masa lalu, diantaranya pada metafisika dan etika. (Wikipedia, 2022). Selain dari itu, dengan berdasarkan pengertian verifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) verifikasi merupakan

suatu pemeriksaan tentang atau mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan juga lain sebagainya.

Validasi atau validitas adalah mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya baik itu antar individu, kelompok, atau juga situasi yang mengenai karakteristik yang akan diukur, atau juga kesalahan sebenarnya pada individu ataupun juga kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. (KBBI, 2022) Sehingga pengertian validitas dengan secara umum merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau juga kesahihan pada suatu instrument. Hal tersebut berarti bahwa suatu instrumen tersebut akan dikatakan atau dianggap valid apabila sanggup atau mampu mengukur apa yang diinginkan.

Verifikasi bertujuan untuk membuktikan bahwa sesuatu ada atau benar, atau untuk memastikan bahwa sesuatu adalah benar (Verify : to prove that something exists or is true, or to make certain that something is correct), sedangkan validasi bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya (Validate : to make something officially acceptable or approved, especially after examining it) (Cambridge Dictionaries Online, 2011).

Pengertian Bukti transaksi menurut Azhar Susanto (2013:8) adalah peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan menurut Mursyidi (2010:39) Transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis tidak hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang namun juga akibat adanya kehilangan kebakaran, arus dan juga peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Skousen (2009:71) Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis.

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Di lihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Winarno (2006) sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda akan tetapi komponen-komponen tersebut saling bekerja sama dan bergantung satu sama lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata andal, adalah dapat dipercaya selain itu andal juga memiliki arti Memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang berulang. Menurut Hutahaean (2015) sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan dengan sasaran tertentu. Sehingga membentuk sebuah satu rangkaian yang mampu untuk mencapai tujuan. Menurut Sutabri (2012) secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi saling bekerjasama, saling bergantung satu sama lain dan terpadu.

C. METODE PENELITIAN

C.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Sebagaimana Emzir (2012) mendeskripsikan bahwasannya desain penelitian merupakan sebuah rancangan yang menentukan para peneliti ketujuan penelitian agar dapat memperoleh berbagai jawaban dari berbagai pertanyaan yang telah peneliti ajukan kepada pemberi informasi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, hal ini ditujukan untuk fokus dalam penemuan suatu makna dari pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan terkait rancangan strategi dalam pencegahan fraud accounting yang terjadi pada perusahaan. Dalam penjelasan Bogdan dan Taylor dalam Enista (2007) menjelaskan pada penelitian berbentuk kualitatif dimaksudkan untuk suatu rangkaian penelitian untuk dapat memperlihatkan hasil data deskriptif yang berbentuk tulisan ataupun ucapan dan perilaku manusia yang dijadikan sebagai subjek pengamatan didalam penelitian. Penelitian kualitatif dapat

menghasilkan penjelasan yang lebih rinci tentang perilaku, ucapan dari sumber, dan beragam kitab suci yang dapat diamati dari perspektif tertentu oleh kelompok, individu, komunitas, atau lembaga tertentu. Lebih lengkap, komprehensif, perspektif, dan holistik.

C.2 Pendekatan Studi Kasus

Penelitian studi kasus dikatakan sebagai suatu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia yang didasarkan pada opini manusia itu sendiri (Polit & Beck, 2004). Subjek penelitian ini dapat berupa individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat. Herdiansyah (2015) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus merupakan suatu rancangan penelitian yang memiliki sifat komprehensif, intens, memerinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah berbagai masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (berbatas waktu)

C.3 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada tipe data kategoris, yang dijelaskan mencakup data yang disajikan dalam bentuk verbal yang tidak menyiratkan bentuk numerik. Emzir (2012) mendeskripsikan data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung atau langsung dari sumber primer. Mengidentifikasi pelapor Menurut Hary (2015), dalam akunnya, ia menggambarkan pelapor dalam penelitian sebagai orang atau aktor yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah dan terlibat langsung dalam masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti erat kaitannya dengan faktor konseptual.

C.4 Metode Pengumpulan Data

Bungin (2005) menjelaskan bahwa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan pada penelitian ini, meliputi sebagai berikut ini:

1. In Depth Interview

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang merupakan pemimpin perusahaan atau lembaga pemerintahan, wawancara secara mendalam dilakukan terkait dengan bagaimana perancangan system verifikasi buti transaksi yang memiliki peranan penting dalam memaksimalkan pencegahan *fraud* accounting, khususnya mencegah terjadinya pemanipulasian bukti transaksi. Langkah-langkah pada saat wawancara mendalam di penelitian ini merupakan sebagai berikut:

- a. melaksanakan perstruktur hal-hal yang tidak terstruktur dan melakukan wawancara terbuka.
- b. Untuk menerjemahkan hasil wawancara dengan informan, digunakan peralatan persiapan dan buka wawancara secara lengkap dalam bentuk rekaman.

2. Studi Dokumen

Penelitian ini menggunakan dokumen sebagai sumber data yang berasal langsung dari subjek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dalam studi kasus ini meliputi dokumen administrasi, surat, memo, agenda, dan artikel pers. bahwa peneliti dapat mempresentasikannya kepada orang lain (Emzir, 2014). Studi Dokumen dalam penelitian berupa agenda dari draft

rancangan terkait system verifikasi keabsahan bukti transaksi yang disampaikan oleh pemimpin perusahaan atau lembaga pemerintahan maupun pemimpin organisasi nirlaba.

Selain itu terkait teknis analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reduksi data Dalam analisis data penelitian ini dilakukan reduksi data terlebih dahulu. Pertimbangkan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan tertulis (data mentah). Seperti reduksi data, ini terjadi terus menerus selama proyek yang berfokus pada kualitas.
- 2) Model Data/Penyajian Data Tahap kedua adalah penyajian data. Penyajian data disini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan dalam merangkai sekumpulan informasi. Menurut Emzir, melihat jejak dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan kemudian mendasarkan analisis dan tindakan lebih lanjut pada pemahaman itu.
- 3) Menarik kesimpulan/mengkonfirmasi kesimpulan. Tahap ketiga dari pekerjaan analitis melibatkan penarikan dan konfirmasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti yang berkualitas mulai menentukan apa "makna" itu dengan melihat penjelasan, pola, kemungkinan konfigurasi, keteraturan, rasio, dan kausalitas. Seorang peneliti berpengalaman dapat menjawab kesimpulan ini dengan jelas, jujur, dan skeptis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Kondisi Temuan *fraud Accounting*

Fraud Accounting dikatakan sebagai jenis penipuan keuangan yang melanggar keuangan atau undang-undang perusahaan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok individu, orang dalam, atau individu yang terlibat langsung dengan instansi pemerintah atau perusahaan. Insiden penipuan akuntansi terjadi di berbagai industri setiap tahun. Di bawah ini adalah hasil dari kecurangan akuntansi yang sering terjadi dalam kerangka pemerintah dan perusahaan.

1. Rekayasa di Atas Kertas

Rekayasa di atas kertas merupakan kata lain dari manipulasi nota. Manipulasi nota bukanlah hal yang tabu lagi dalam kalangan pemerintahan maupun perusahaan, Manipulasi nota merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh oknum tertentu baik individu maupun kelompok dengan cara merekayasa sebuah bukti transaksi tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya. Misalnya pengeluaran dalam suatu kegiatan 750.000, namun dalam bukti transaksi diubah menjadi 950.000. Dalam kasus ini terdapat perubahan nominal yang tentunya didukung dengan bukti transaksi yang berubah juga. Kasus seperti ini sudah sering terjadi, Bahkan berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti ada beberapa toko yang menyediakan jasa nota kosong.

2. Pemalsuan Bukti Transaksi dan Bukti Stempel

Pemalsuan Bukti Transaksi bukanlah hal yang baru terjadi, Temuan *fraud accounting* ini, terjadi karena ada upaya dari individu atau kelompok tertentu yang ingin menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dari Bukti transaksi yang dipalsukan, pemalsuan bukti transaksi yang dimaksudkan disini adalah dengan membuat sendiri berikut juga nama

toko dan stemple, seolah-olah Pembelian barang tersebut ada, nama toko/ perusahaan tempat membeli barang tersebut juga ada, berikut juga dengan stemple yang sudah dicetak.

D.2. Penyebab Terjadinya *Fraud Accounting*

Setiap Tindakan *fraud accounting* yang terjadi pasti dimulai dengan sebuah pemicu atau penyebab. Berikut ini merupakan penyebab terjadi *fraud accounting* pada Lembaga pemerintahan atau perusahaan:

1. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan dikatakan sebagai sebuah upaya pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan pihak tertentu untuk mecegahnya terjadi *fraud*. Salah satu penyebab terjadinya *fraud accounting* adalah kurangnya pengawasan, sehingga karyawan atau pegawai merasa bebas melakukan Tindakan tanpa adanya pengawasan, sehingga dengan kurangnya pengawasan, oknum tersebut merasa aman dan terus melakukannya sehingga sudah seperti habituasi atau sebuah kebiasaan. Salah satu informan yaitu bapak Ahmad yang merupakan pemilik dan pemimpin dari salah satu perusahaan mengatakan bahwa:

“manipulasi nota bisa terjadi karna ndak adanya control dari manajemen perusahaan, ajdi seenaknya saja untuk bebas melakukan fraud tanpa takut terkana sanksi”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut terkait respon penyebab terjadinya *fraud*, maka terlihat bahwa dengan kurangnya pengawasan akan menyebabkan semakin bertambahnya oknum pelaku *fraud* dalam lingkungan kerja karena perasaan merasa habituasi yang sudah terpatriti, tidak takut akan adanya sanksi dari pelanggaran yang dilakukan, hal tersebut dianggap sudah menjadi sesuatu tindakan yang biasa. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan pelaku-pelaku *fraud accounting* lainnya bermunculan karena menganggap bahwa hal tersebut adalah rasionalisasi.

2. Sistem Pengendalian Yang Tidak Baik

Sistem anti *fraud* adalah strategi yang dikembangkan oleh instansi pemerintah atau perusahaan anti *fraud* yang mengacu pada proses *Fraud* dan mempertimbangkan karakteristik dan ruang lingkup probabilitas *Fraud* yang disusun secara sistematis untuk memastikan program kepatuhan anti *Fraud* bank berkembang, menerapkan, dan meningkatkan Salah satu penyebab terjadinya kecurangan akuntansi di lembaga negara dan perusahaan adalah sistem manajemen yang tidak memadai. Seorang pegawai atau pegawai lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kecurangan akuntansi jika sistem pengendaliannya tidak memadai.

3. Budaya Kerja Yang Tidak Baik

Budaya tempat kerja yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan dan sikap dalam bertindak, Tidak atau tidak adanya lembaga anti *fraud* memerlukan budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang buruk merupakan salah satu penyebab terjadinya kecurangan akuntansi di instansi pemerintah dan perusahaan. Budaya ini menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang sulit dihilangkan karena merupakan bawaan dan kebiasaan. Salah satu informan mengungkapkan bahwa budaya kerja yang buruk dapat menjadi penyebab *fraud*:

“ kalau budaya kerja dalam perusahaan tersebut buruk, maka anggota atau karyawan dalam organisasi tersebut akan tertular budaya yang tidak baik juga”

Dari Kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya kerja yang buruk dalam organisasi akan memunculkan penularan pada anggota dalam organisasi, penularan yang dimaksud adalah menularkan sifat

atau perilaku yang tidak baik. Misalnya, dalam organisasi tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk tidak mengembalikan uang pelanggan jika dibawah seribu rupiah, keuntungan tersebut akan dibagi rata kepada anggota tim dalam perusahaan, kebiasaan yang tidak baik ini tentunya akan menular kepada tim lain dalam organisasi perusahaan, dan akan mengakibatkan organisasi tersebut luntur karena penularan budaya kerja yang tidak baik tersebut yang telah mendarah daging kedalam tubuh anggota organisasi atau perusahaan.

D.3. Rancangan Strategi dan Kebijakan Pencegahan Fraud Accounting

Untuk mencegah terjadinya *fraud* accounting baik pada lembaga pemerintahan maupun perusahaan, maka perlu dirancang beberapa sistem dan kebijakan. Berikut ini merupakan rancangan sistem verifikasi keabsahan bukti transaksi sebagai strategi pencegahan *fraud* accounting:

1. Mendaftarkan Nilai Wajar barang-barang yang dibutuhkan dalam satu tahun oleh Lembaga pemerintahan atau perusahaan kedalam sebuah sistem.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan harga wajar barang yang diperusahaan atau Lembaga pemerintahan dalam satu tahun, jika nominal tidak sesuai dengan nilai wajar, maka sistem akan menolak.

Tabel 1

Daftar Nilai Wajar

No	Nama Barang	Jenis	Harga Wajar
1	Samsung 43" QLED 4K Q63B	Alat Elektronik	Rp 4.500.000,00/ buah
2	Gulaku	Sembako	Rp13.250,00/Kg

Berikut ini merupakan contoh penyajian daftar nilai wajar yang nantinya akan didata oleh Tim pendataan nilai wajar, kemudian akan diverifikasi apakah data tersebut valid atau tidak, setelah selesai divalidasi, maka data nilai wajar barang tersebut akan dimasukkan kedalam sebuah sistem.

2. Mencari Mitra kerja sesuai dengan kebutuhan barang yang diperlukan dalam satu tahun.

Pencarian mitra kerja untuk memenuhi kebutuhan barang, merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mencegah *fraud* accounting, dengan setelah mendapatkan mitra kerja maka akan dibuat sebuah kontrak yang berisikan perjanjian dan komitmen antara kedua belah pihak. Dengan sudah terjalannya komitmen dengan baik, maka menghindari dari pembelian barang yang illegal dari pihak lain yang dapat memicu terjadinya *fraud* accounting. Dengan mekanisme seperti ini, menutup peluang pihak karyawan untuk melakukan manipulasi nota.

3. Sistem Verifikasi Keabsahan Bukti transaksi

Tahapan yang terakhir adalah dengan memverifikasi keabsahan bukti transaksi, Jadi dari bukti transaksi pembelian barang tersebut akan dimasukkan kedalam sebuah sistem, dan secara otomatis sistem

akan memverifikasi mulai dari keberadaan toko tersebut apakah ada berikut juga dengan npwp perusahaan atau toko tempat membeli kebutuhan instansi tersebut. Selanjutnya adalah dengan me,verifikasi keabsahan stemple pada bukti transaksi tersebut.

D.4. Kebijakan Dalam Implementasi Rancangan Mekanisme Pencegahan *Fraud Accounting*

Untuk melakukan dan mengimplementasi kebijakan tersebut diperlukan beberapa tahapan , yang akan dirincikan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Validasi Nilai wajar Barang

Berikut ini merupakan Tim yang harus dibentuk dalam proses validasi nilai wajar barang:

a. Pendataan Nilai wajar Barang

Untuk mevalidasi nilai wajar barang dibutuhkan tim khusus dalam melakukan pendataan nilai wajar barang, mulai dari jenis barang, merek barang sampai kepada aharag dan pemasok barang tersebut.

b. Membentuk Tim validasi Nilai Wajar barang

Tim selanjutnya adalah tim yang bertugas untuk memvalidasi bila wajar barang sebelum diinput kedalam sebuah sistem. Tujuannya bahwa data yang didapatkan adalah ebnar dan sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut.

c. Membentuk Tim Penginputan Nilai wajar Barang

Tim yang terakhir dalam proses validasi nilai wajar barang adalah Tim penginputan nilai wajar barang. Dimana tim yang dibentuk bertuga menginputkan nilai wajar yang telah divalidasi etrsebut kedalam sebuah sistem.

2. Merancang dan menyiapkan sebuah sistem Validasi Keabsahan Bukti Transaksi

Langkah selanjutnya adalah dengan merancang dan menyiapkan sebuah sistem validasi keabsahan bukti transaksi. Dengan sistem yang disiapkan dapat mevalidasi keabsahan dari bukti transaksi yang telah diinput kedalam sistem.

3. Output validasi adalah sebuah secarik kertas tanda validasi yang dapat diteruskan ke bagian akuntansi yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa sebuah transaksi normal. Bagian akuntansi akan menggunakan bukti kewajaran ini sebagai bagian dari proses anti *fraud* telah dilaksanakan dengan baik di organisasi mereka.

E. PENUTUP

Dalam mencegah terjadinya *fraud accounting* yang berkelanjutan diperlukan sebuah sistem kebijakan anti *fraud*. Dimana upaya tersebut dilakukan dengan membutuhkan kolaborasi antara Instansi yang bersangkutan, karyawan atau pegawai, Tim Audit Internal maupun Tim vendor pembuat sistem anti *fraud* atau yang disebut dengan sistem validasi

bukti transaksi. Sebuah sistem anti *fraud* meningkatkan dan mencegah kesadaran di antara staf bahwa rencana respons telah dirancang, untuk menangani dan meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh upaya penipuan. Dengan secara eksplisit mendefinisikan tindakan yang merupakan penipuan, sebuah organisasi memastikan dan memberikan keyakinan bahwa melakukan *fraud* bukan hanya kesalahan moral namun sebuah kesalahan yang merugikan organisasi dan merugikan individu.

Sistem verifikasi keabsahan bukti transaksi berupaya mendeteksi potensi penipuan dengan mendeteksi kelainan atau penyimpangan dari perilaku atau tren "normal". Sistem verifikasi melakukan ini dengan membuat kesimpulan awal bahwa bukti transaksi tidak dapat dijadikan bukti bahwa terjadi kegiatan transaksi yang normal dan sah.

Metode verifikasi ini dapat dilakukan secara dini dan tanpa tanda-tanda kecurangan yang ditunjukkan sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi kecurangan lebih awal. Meskipun diawal eksekusi membutuhkan beberapa proses penyesuaian namun sistem verifikasi ini dapat menghemat uang organisasi dalam jumlah besar jika penipuan terdeteksi lebih awal.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang keterbatasan dari penelitian dimana penelitian ini hanya menggunakan tiga informan saja, dimana penelitian selanjutnya menggunakan informan lebih dari tiga dan menggunakan pendekatan fenomenologi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). Report to The Nation on Occupational *Fraud* and Abuse. Austin, Texas: Association of Certified *Fraud* Examiners.
- Agoes, Sukrisno. (2017). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Albrecht. W. S. 2003. *Fraud Examination*. South western: Thomson
- Alwi, Hasan dkk. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Ke3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh Auditor Internal. www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf
- Arens. Alvin A et al. 2008. Jasa Audit dan Asuransi. Jakarta: PT. Erlangga
- Azhar Susanto, (2013), Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian Resiko-Pengembangan, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung.
- Bungin, Burhan. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Rajawali Pers.
- Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Analisis Data. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eko Sudarmanto, Citra Kharisma Utami. 2021. Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal dalam Perspektif Alquran. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 195-208.
- Hery. 2010. Potret Audit Internal. Bandung: Alfabeta
- Herdiansyah, H. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/verification>
- Idawati, W. & Eveline, R. (2016). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi, Vol. XX, No.1, Hal: 16- 32.
- IEEE, I. o. E. a. E. E., 2006. 610 Standard Glossary of Software Engineering Terminology. s.l.:United States of America: The Institute of Electrical and Electronics Engineer.
- J. Hutahaean, Konsep Sistem Informasi, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Kosasih. Ruhcyat. 1981. Auditing: Prinsip Dan Prosedur. Ananda Yogyakarta: Yogyakarta
- Mursyidi. 2013. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Polit, D. F., Beck, C. T., & Hungler. (2004). Canadian Essential of Nursing Research. Philadelphia: Lippincot
- Stice, Earl K, James D Stice dan Fred Skousen, 2009 Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi 16, Buku 2. Edisi Bahasa Indonesia. Terjemah Oleh Ali Akbar. PT. Salemba Empat: Jakarta.
- Surjandari, DA., dan I. Martaningtyas. 2015. An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, on Fraud of Indonesia Government Officer. Mediterranean Journal of Social Sciences Volume 6 No.5: 71-76.doi: 10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71
- Sutabri, Tata. 2012. Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Thamaroni Usman. 2020. keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian jual beli barang dari perspektif hukum perdata. Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp. 87-98. Indonesian Private Law Review. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
- Yurmaini. 2017. Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam, 94.
- Winarno, Wing Wahyu, 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta